



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar

2024

 (0342) 800104

 dkpp.blitarkota.go.id

 Jl. Trembesi No. 13 Kota Blitar





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP yang kemudian menjadi bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 28 Pebruari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**



Drh. DEWI MASITOH, M.Agr.
Perbina Tingkat 1 (IVb)
NIP. 19791206 200604 2 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun 2024. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan tugas pada urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 5 (lima) rumusan sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Walaupun terjadi inflasi terutama pada bahan pangan pokok dan terjadi cuaca ekstrim, namun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 memperoleh capaian **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Inteprestasi Capaian
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	milyar rupiah	213,52	200,43	93,87	Berhasil
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	220.141,40	173.776,40	78,94	Berhasil
	Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	100.123,00	104.314,32	104,19	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.489,33	2.503,40	100,57	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.740.863	4.742.797	100,04	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	ribu rupiah	92181425,08	115.849.972,00	125,68	Sangat Berhasil
	Nilai produksi hasil perikanan	ribu rupiah	34977794,39	37.829.168,00	108,15	Sangat Berhasil
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	angka	87,7	88,87	101,33	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	angka	85,23	85,23	100,00	Sangat Berhasil



Produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2024 mencapai 200,43 milyar rupiah dan mencapai 93,87% dari target sebesar 213,52 milyar rupiah. Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 sebesar 88,87 point atau sebesar 101,33% dari target sebesar 87,7 point. Kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2024 mencapai 85,23 point atau mencapai 100% dari target daerah. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 173.776,40 kwintal atau mencapai 78,94% dari target sebesar 220.141,40 kwintal. Capaian produksi hasil peternakan pada tahun 2024 sebesar 104.314,32 kwintal mencapai 104,19% dari target sebesar 100.123 kwintal. Indikator sasaran produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2024 untuk produksi hasil budidaya ikan konsumsi sebesar 2.503,40 kwintal mencapai 100,57% dari target sebesar 22.489,33 kwintal, produksi hasil ikan hias sebesar 4.742.797 ekor mencapai 100,04% dari target sebesar 4.740.863 ekor, nilai produksi hasil pertanian terealisasi sebesar 115.849.972 ribu rupiah atau sebesar 125,68% dari target 92.181.425,08 ribu rupiah dan nilai produksi hasil perikanan terealisasi sebesar 37.829.168 ribu rupiah atau sebesar 108,15 % dari target 34.977.794,39 ribu rupiah.

Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024 masuk dalam kategori **Sangat berhasil** dan **Berhasil**. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Blitar, 28 Pebruari 2025





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	9
F. Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2021-2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	17
B. Akuntabilitas Keuangan / Cost Per Outcame.....	49
C. Prestasi/Penghargaan	54
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	
a. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	
b. Rencana Kinerja Tahunan 2024	
c. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
d. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*) merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat melalui media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana serta sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka penerapan SAKIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi perencanaan pelaksanaan maupun hasil-hasilnya yang dilaporkan dalam bentuk LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- f. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- g. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota
- h. Koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- i. Pengembangan sarana prasarana pertanian
- j. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- k. Pembinaan produksi di bidang pertanian
- l. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
- m. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- n. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- o. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
- p. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja

- q. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- r. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- u. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
- w. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perencanaan operasional program ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan, di tingkat kota;
- d. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.



Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- e. Bidang Peternakan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama satu Tahun 2024, dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Provinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029);
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang;
- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 disusun berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;





2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Sebagai pengemban urusan pangan, pertanian dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan instansi-instansi vertikal terkait.
2. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
3. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
4. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan isu peningkatan daya saing produk pertanian.
5. Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 untuk peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi dan industrialisasi bidang pertanian dan pangan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Sedangkan isu – isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan penduduk rawan pangan di Kota Blitar belum dapat dilakukan secara efektif.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.



3. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan berdampak pada penurunan kualitas kesuburan lahan sawah.
4. Terjadinya wabah penyakit menular hewan ternak (PMK dan LSD) yang berdampak pada penurunan produksi hasil peternakan.
5. Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.
6. Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman, ternak dan ikan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

KOTA BLITAR

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

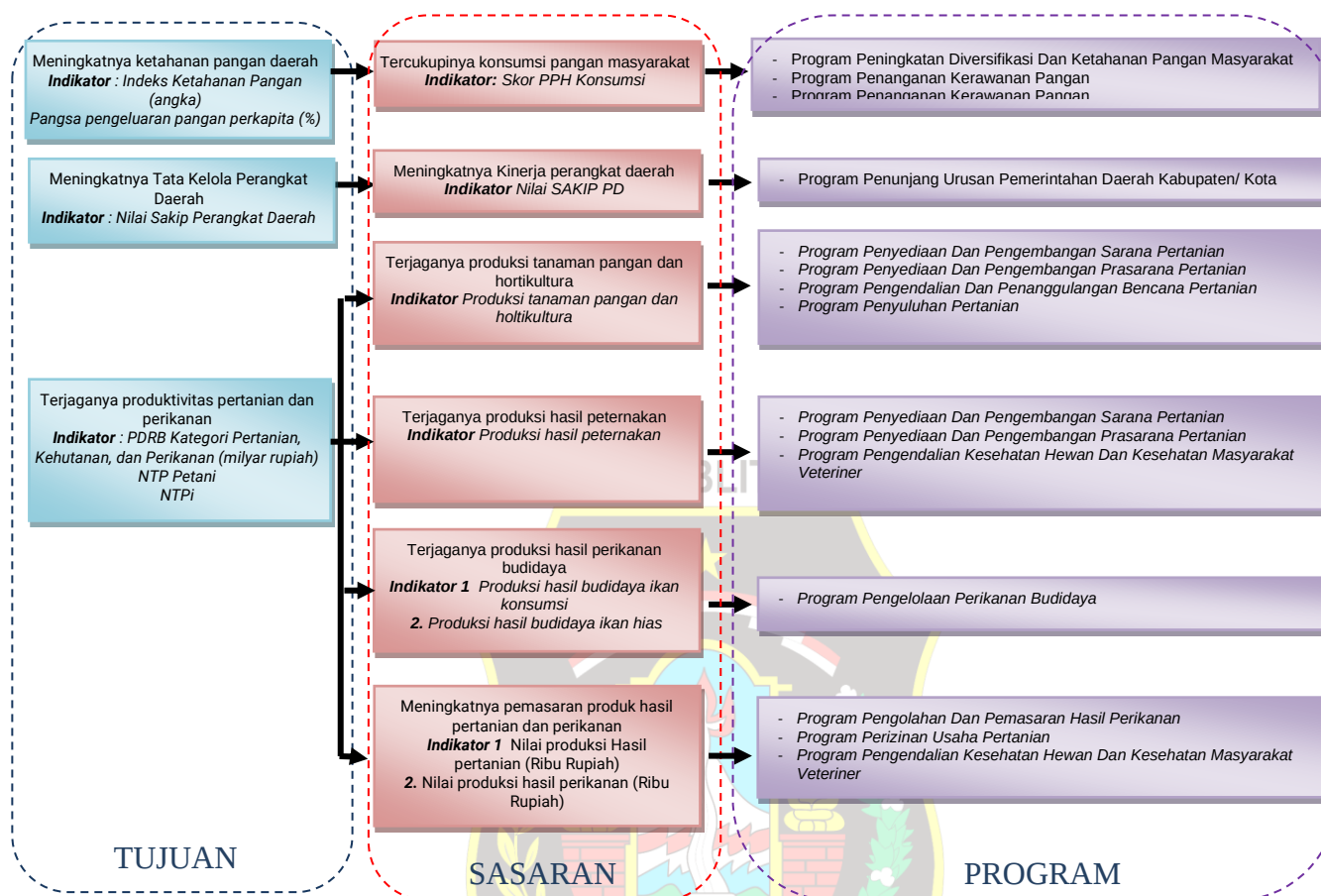
Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat**. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar sebagai salah satu pengampu indikator kinerja utama dari misi ke-4 yaitu “: ***Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital***”.

Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2

Matrik Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar



Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran

dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pencapaian visi dan misi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
				2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan			75,18	75,68	76,18
	Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita			42,36 %	42,16 %	41,96 %
		Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,75	87	88,5
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			198,8 milyar rupiah	199,79 milyar rupiah	200,79 milyar rupiah
	Nilai Tukar Petani			101,67	102,17	102,67
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan			101	101,5	102
		Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.325,67 kwintal	198.444,66 kwintal	198.563,73 kwintal
			Jumlah produksi hasil peternakan	84827,72 kwintal	85042,36 kwintal	85356,3 kwintal
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.489,33 kwintal	2.519,10 kwintal	2.549,33 kwintal
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.740.863 ekor	4.762.197 ekor	4.783.627 ekor
		Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	92.181.425.080 rupiah	94.025.053.580 rupiah	95.905.554.660 rupiah
			Nilai produksi hasil perikanan	34.977.794.390 rupiah	35.677.350.270 rupiah	36.390.897.280 rupiah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	86,25	86,5	86,75	87	88,5
2	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
3	Jumlah produksi hasil peternakan	Kwintal	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356
4	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
5	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628

Adapun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam "Lampiran 1. Matriks Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026".

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendapatkan pelimpahan kinerja dari Walikota Blitar yaitu terjaganya produktifitas pertanian dan perikanan, sehingga terdapat perbedaan perjanjian kinerja

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	213,52 Milyar
2.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,70
3.	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141,40 kwintal
4.	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	100.123 kwintal
5.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.489,33 kwintal
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.740.863 ekor
6.	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	92.181.425,08 (000 rupiah)
		Nilai produksi hasil perikanan	34.977.794,39 (000 rupiah)
7.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,23)

Sedangkan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

A.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Target dan realisasi kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

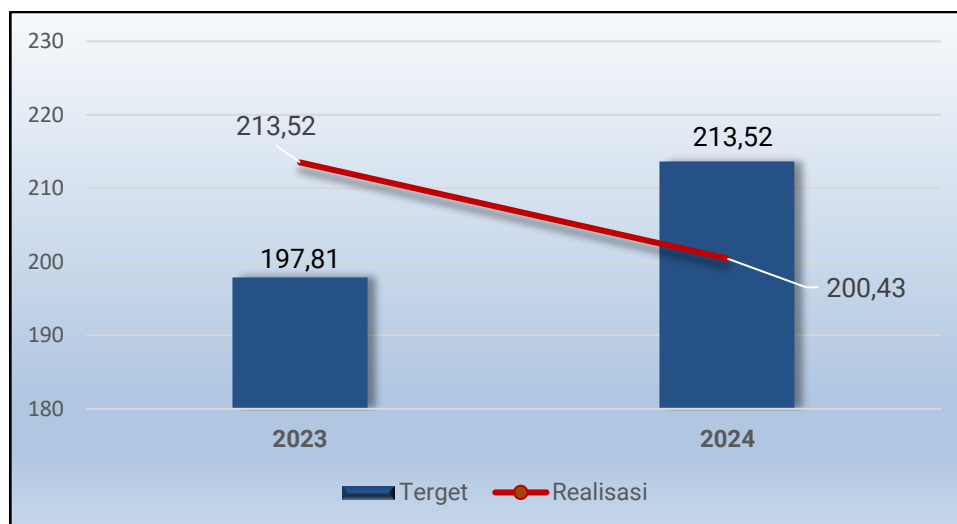
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Inteprestasi Capaian
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	milyar rupiah	213,52	200,43	93,87	Berhasil
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	220.141,40	173.776,40	78,94	Berhasil
	Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	100.123,00	104.314,32	104,19	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.489,33	2.503,40	100,57	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.740.863	4.742.797	100,04	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	ribu rupiah	92181425,08	115.849.972,00	125,68	Sangat Berhasil
	Nilai produksi hasil perikanan	ribu rupiah	34977794,39	37.829.168,00	108,15	Sangat Berhasil
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	angka	87,7	88,87	101,33	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	angka	85,23	85,23	100,00	Sangat Berhasil

A.1.1 Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

➤ **Indikator Kinerja : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.**

Grafik 3.1
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2023-2024



Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor pertanian yang tumbuh dari suatu daerah. Dengan kata lain PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang menghasilkan komposisi data nilai tambah dirinci menurut lapangan usaha baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstans. Dalam pengukuran produktivitas pertanian dan perikanan digunakan indikator PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggambarkan kemampuan sumberdaya ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kota Blitar. Untuk Kota Blitar, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari komponen produk primer dari sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) dan sub sektor perikanan, dikarenakan Kota Blitar tidak memiliki hutan. Pada tahun 2024 nilai PDRB ADHB untuk sektor pertanian dan perikanan adalah sebesar 200,43 milyar rupiah atau

sebesar 93,87% dari target yang telah ditetapkan. Capaian PDRB ini mengalami penurunan sebesar 12,13% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan nilai PDRB dikarenakan adanya penurunan produksi pertanian terutama pada tanaman pangan.

Grafik 3.2
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2021-2024



Perkembangan PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sangat fluktuatif. Hal ini dikarenakan nilai PDRB ini didapatkan dari perhitungan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta harga pasar sehingga sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan inflasi.

A.1.2 Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan

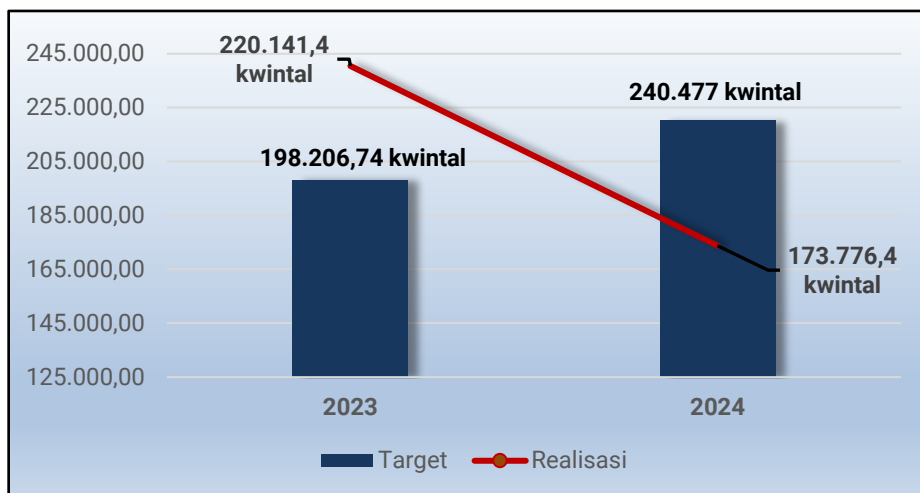
Indikator Kinerja 1 : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sebagai daerah perkotaan, ketersediaan pangan di Kota Blitar lebih banyak didukung oleh perdagangan antar daerah disekitarnya. Akan tetapi walaupun bukan sebagai penyedia utama dalam pemenuhan ketersediaan pangan daerah, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tetap memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Selain itu untuk menjamin ketersediaan pangan minimal seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, setiap daerah harus memiliki lahan abadi untuk produksi pangan berkelanjutan yang disebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilihat dari kemampuan lahan memproduksi dalam 1 (satu) tahun. Jumlah produksi total yang

dihasilkan berasal dari produksi tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan dalam satu tahun.

Grafik 3.7

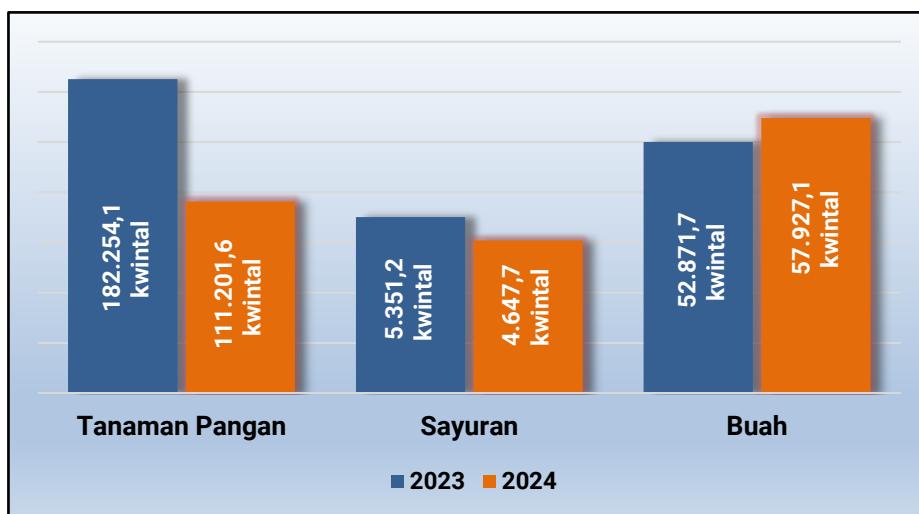
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kwintal) Tahun 2023-2024



Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2024 sebesar 173.776,40 kwintal atau sebesar 78,94% dari target sebesar 220.141,40 kwintal. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 27,74% di bandingkan pada tahun 2023 dimana jumlah produksi mencapai 240.477 kwintal. Sedangkan produksi per jenis tanaman dapat dilihat dari diagram dibawah ini.

Grafik 3.8

Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-Buahan (Kwintal) Tahun 2023-2024



Produksi tanaman pangan dan hortikultura ini terdiri dari komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran. Produksi tanaman pangan pada tahun 2024 sebesar 76.268,24 kwintal dan mengalami penurunan sebesar 58,15% dibandingkan tahun 2023. Demikian juga untuk produksi sayuran mencapai 4.647,7,20 kwintal dan mengalami penurunan sebesar 13,15% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan produksi buah-buahan mengalami peningkatan sebesar 9,56% dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel. 3.3
Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-Buahan Per Jenis Komoditas (Kwintal)
Tahun 2023-2024

No.	Komoditas	Tahun		% Peningkatan / Penurunan
		2023	2024	
A	Tanaman Pangan			
1	Padi Sawah	81.696	36.242	-55,64
2	Jagung Sawah	96.944	70.849	-26,92
3	Ubi Jalar/Ketela Rambat	440	2.750	525,00
4	Kacang Tanah	3.660	1.360	-62,84
	Jumlah Tanaman Pangan	182.740	111.202	-39,15
B	Sayur - Sayuran			
1	Kubis	82	60	-26,83
2	Kembang Kol	260	0	-100,00
3	Petsai/Sawi	281	376	33,81
4	Kacang Merah	32	0	-100,00
5	Kacang Panjang	46	72	56,52
6	Cabe Besar	1.334	172	-87,11
7	Cabe Rawit	500	1.748	249,81
8	Jamur	798	355	-55,52
9	Paprika	96	0	-100,00
10	Tomat	510	94	-81,57
11	Terung	578	871	50,69
12	Labu Siam	600	0	-100,00
13	Kangkung	235	900	282,98
	Jumlah Sayur-Sayuran	5.351	4.648	-13,15
C.	Buah Buahan			
1	Blewah	614	0	-100,00
2	Melon	0	30	100,00
3	Stroberi	16.812	0	-100,00
4	Alpukat	524	1.190	126,85
5	Belimbing	8.184	31.539	285,37
6	Duku/Langsar/Kokosan	69	62	-10,35
7	Durian	384	483	25,91
8	Jambu Biji	305	162	-46,89
9	Jambu Air	0	190	100,00
10	Jeruk Siam/Kepron	8.461	137	-98,38

No.	Komoditas	Tahun		% Peningkatan / Penurunan
		2023	2024	
11	Mangga	232	7.598	3175,00
12	Manggis	66	66	0,00
13	Nangka	4.771	234	-95,10
14	Nanas	134	0	-100,00
15	Pepaya	8.147	6.277	-22,95
16	Pisang	529	664	25,43
17	Rambutan	3.561	9.092	155,32
18	Sawo	0	126	100,00
19	Sirsak	48	47	-2,08
20	Sukun	31	31	0,00
Jumlah Buah-Buahan		52.872	57.927	9,56

Produksi tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 39,15%. Penurunan produksi tanaman pangan terjadi pada komoditas padi sawah, jagung dan kacang tanah. Sedangkan untuk produksi ubi jalar/ketela rambat mengalami kenaikan sebesar 525%. Hal ini disebabkan terjadinya kekeringan panjang sebagai akibat dari el-nino sehingga petani lebih selektif dalam melaksanakan budidaya tanaman. Sedangkan pada komoditas sayuran juga mengalami penurunan sebesar 13,15% dibandingkan tahun lalu. Komoditas yang banyak diusahakan berupa komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan dan mempunyai nilai jual yang tinggi seperti Cabe Rawit, Kacang Panjang, Terung dan Kangkung. Sebaliknya, produksi buah-buahan mengalami peningkatan sebesar 9,56%. Musim kemarau panjang berdampak positif dalam pertumbuhan bunga beberapa jenis tanaman buah tahunan seperti mangga, belimbing, alpukat dan rambutan. Kombinasi faktor stres air, cahaya matahari yang cukup, pengurangan pertumbuhan vegetatif, polinasi yang lebih baik, dan adaptasi alami menyebabkan beberapa tanaman buah tahunan berbuah pada musim kemarau. Selain itu beberapa pohon yang sudah masuk dalam masa berproduksi juga menambah produksi tanaman buah-buahan.

Untuk menjaga produksi tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2024 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani secara rutin sebagai bentuk antisipasi terjadinya cuaca ekstrim untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Pada Tahun 2024

juga dilaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik dan budidaya padi sehat (PTPS) yang kedepannya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelatihan PTPS di berikan kepada 4 kelompok tani di Kel. Ngadirejo (2 kelompok), Kel. Tanggung (1 kelompok) dan Kel. Pakunden (1 kelompok). Sedangkan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pembuatan pupuk organik diberikan kepada 16 kelompok yaitu di Kel, Klampok (5 kelompok), Kel. Sentul (1 kelompok), Kel. Tanjungsari (1 kelompok), Kel. Pakunden (2 kelompok), Kel. Tlumpu (2 kelompok), Kel. Blitar (1 kelompok), Kel. Gedog (1 kelompok), Kel. Sentul (1 kelompok), Kel. Ngadirejo (1 kelompok) dan Kel. Plosokerep (1 kelompok). Peningkatan penggunaan pupuk organik selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk akibat berkurangnya jumlah subsidi pupuk juga untuk mewujudkan pertanian yang berwawasan lingkungan yang nantinya mampu meningkatkan produksi tanaman dan kualitas hasil panen.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM petani, pada tahun 2023 juga dilaksanakan pelatihan dan pembinaan pada kelompok wanita tani (KWT) budidaya tanaman di pekarangan baik sayuran maupun tanaman hias yaitu pelatihan budidaya anggrek dan budidaya tanaman dalam polibag. Selain itu, KWT juga diberikan pelatihan tentang pengolahan dan pengemasan produk hasil pertanian dan produk herbal non pangan yang berbahan dasar mint. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian di pasaran sera mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok wanita tani. Xselain itu juga dilakukan pembinaan dan pendampingan manajemen kelompok tani sehingga mampu meningkatkan nilai kelas kelompok tani.

Beberapa faktor pendorong terjaganya produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah :

1. Masih tingginya minat petani terhadap perkembangan teknologi di bidang pertanian
2. Banyaknya kelompok tani aktif yang mempermudah dan mempercepat penyebaran teknologi pertanian.

3. Adanya program pemberian bantuan modal usaha berupa saprodi dan alsintan melalui APBN, APBD Prop maupun dana khusus seperti DBHCHT dan DAK NF Bidang Ketahanan Pangan.

Sedangkan beberapa faktor yang menghambat terjaganya produksi hasil pertanian adalah :

1. Kekeringan panjang sebagai dampak el nino, mengakibatkan mundurnya musim tanam.
2. Terjadinya alih fungsi lahan terus menerus.
3. Masih tingginya biasa produksi

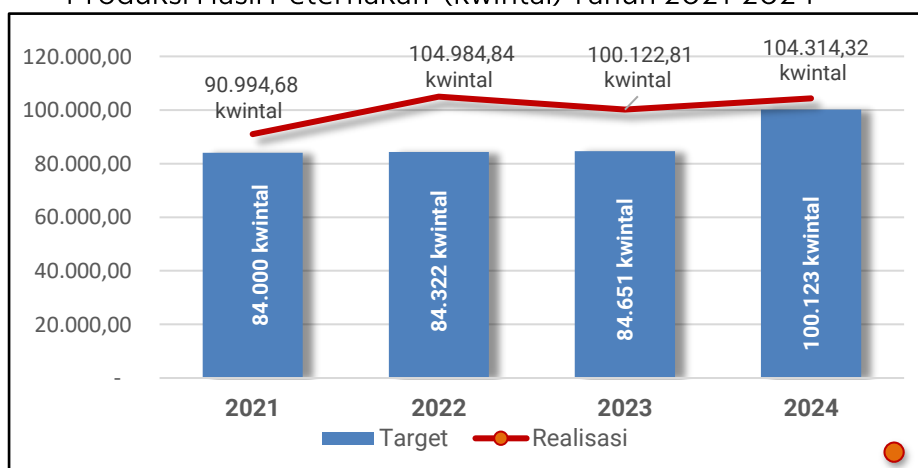
Upaya tindaklanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Mempercepat waktu tanam ketika musim hujan tiba
2. Menambah prasarana pertanian terutama untuk meningkatkan ketersediaan air pada musim kemarau seperti pintu air, pembangunan/rehab JITUT, sumur bor.
3. Pelatihan teknologi pertanian tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya produksi.

Indikator Kinerja 2 : Produksi hasil peternakan

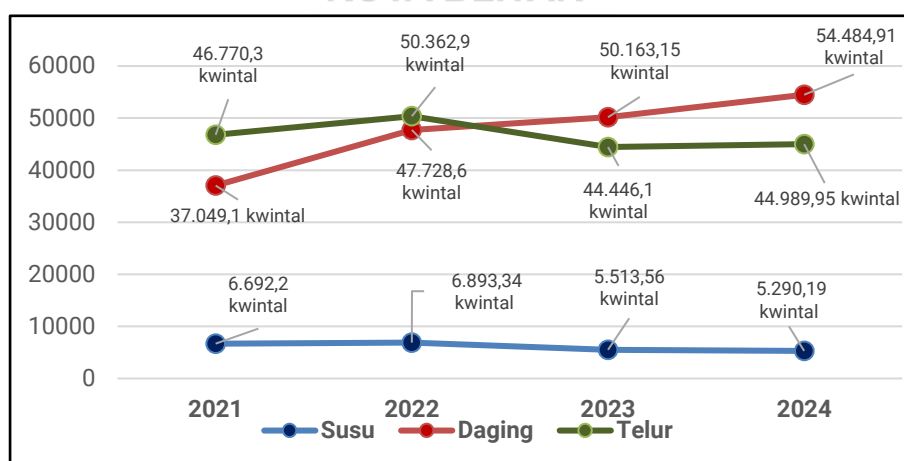
Sub Sektor Peternakan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung ketersediaan pangan terutama dalam penyediaan pangan yang berasal dari pangan hewani yang terdiri dari daging, susu dan telur. Perkembangan produksi ternak mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.9
Produksi Hasil Peternakan (kwintal) Tahun 2021-2024



Pada tahun 2024 produksi hasil peternakan mencapai 104.314,32 kwintal atau sebesar 104,19% dari target sebesar 100.123 kwintal. Produksi hasil peternakan mengalami kenaikan sebesar 4,64% di bandingkan dari tahun tahun 2023. Sedangkan perkembangan produksi hasil peternakan dari tahun 2021-2024 sangat fluktuatif. Setelah mampu pulih pasca pandemi covid tahun 2021, pada tahun 2023 produksi peternakan mengalami penurunan akibat kasus PMK dan LSD yang menyerang pada ternak besar yaitu sapi potong dan sapi perah. Dengan upaya vaksinasi PMK dan LSD secara masif, pada tahun 2024 produksi hasil peternakan kembali mengalami kenaikan.

Grafik 3.10
Produksi Telur, Daging dan Susu (kwintal) Tahun 2021-2024



Produksi hasil peternakan terdiri dari 3 komoditas yaitu daging, telur dan susu. Produksi hasil peternakan paling besar dari produksi daging, kedua berasal dari produksi telur kemudian yang terakhir dari produksi susu. Pada tahun 2024 produksi daging mencapai 54.484,91 kwintal, mengalami kenaikan sebesar 8,62 % dari tahun 2023. Untuk produksi telur pada tahun 2024 sebesar 44.989,95 kwintal, mengalami kenaikan sebesar 1,22% dibanding tahun 2023. Sedangkan untuk komoditas susu mencapai 5.290,19 kwintal, mengalami penurunan 4,05% dibanding tahun 2023. Menurunnya produksi susu disebabkan karena pada tahun 2024 masih merupakan tahun pemulihan dampak dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD). Sedangkan penurunan produksi telur disebabkan oleh kenaikan harga pakan ayam petelur sehingga sebagian peternak mengurangi populasi ternaknya.

Sebagai upaya penanganannya pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelayanan vaksinasi dan pelayanan terpadu ternak sebagai upaya pengendalian penyakit ternak. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemotongan di RPHR dan RPHU, pelatihan pembuatan pakan mandiri untuk peternak dan sosialisasi kepada pedagang untuk menggunakan jasa RPH dalam pemotongan ternaknya.

Selain dari segi sarana prasarana dan kesehatan hewan ternak, stabilisasi produksi hasil peternakan juga didukung oleh peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan penjaminan kesehatan dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pembinaan dan pendampingan kelompok ternak. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemberian layanan terpadu kesehatan hewan dengan optimalisasi pelapor kelurahan, pemberian KIE tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan sertifikasi NKV dan pengujian sampel produk hasil peternakan sebagai jaminan terhadap keamanan produk asal hewan. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah ternak untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

Faktor pendorong peningkatan produksi hasil peternakan adalah :

1. Meningkatnya kesadaran peternak terhadap kesehatan ternaknya
2. Tersedianya SDM yang memadai

Sedangkan beberapa faktor penghambat peningkatan produksi peternakan adalah :

1. Proses pengelolaan pakan khususnya hijauan/rumput yang tidak baik oleh peternak sehingga menyebabkan kasus helminthiasis tinggi.
2. Masih kurangnya pelaksanaan higiene sanitasi dan biosecurity di tingkat peternak skala kecil.
3. Kondisi cuaca mempengaruhi kesehatan ternak, dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan kelembaban tinggi sehingga memicu perkembangan virus, bakteri dan parasit.

Upaya tidak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah :

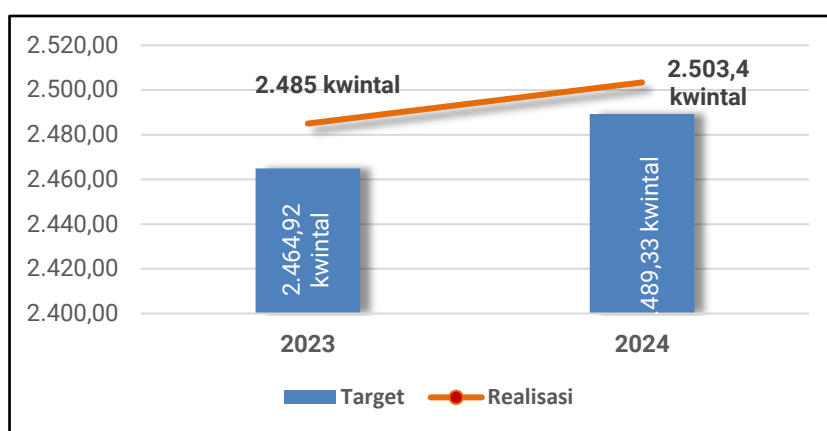
1. Melaksanakan pelayanan terpadu kesehatan hewan secara berkala.
2. Penyediaan vaksin dan obat-obatan ternak.

3. Pembinaan higiene sanitasi dan pembuatan pakan ternak sesuai dengan standar.

Indikator Kinerja 3 : Produksi hasil budidaya ikan konsumsi

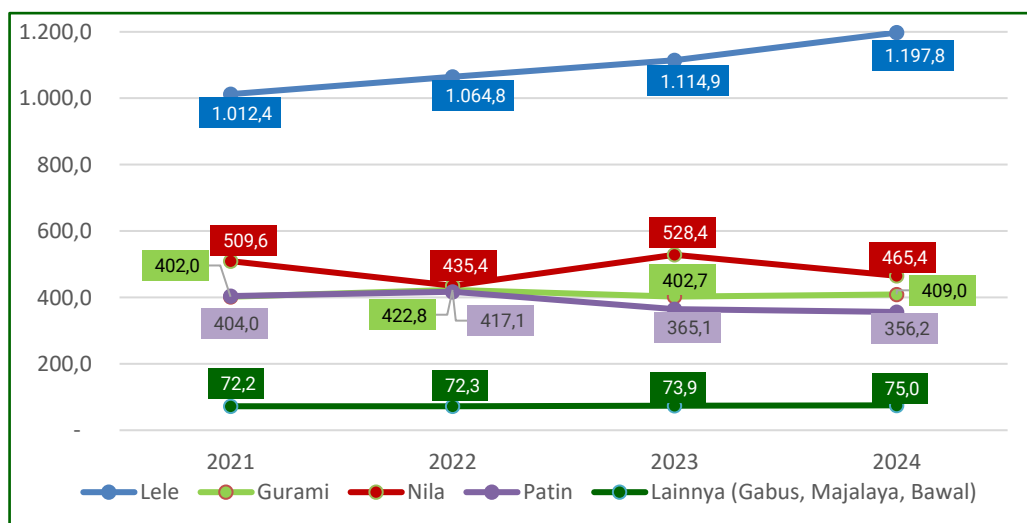
Sektor perikanan merupakan salah satu pendukung perekonomian di Kota Blitar selain sebagai penyedia bahan pangan hewani. Komoditas perikanan yang diusahakan merupakan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 disajikan pada diagram berikut ini.

Grafik 3.11
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2023-2024



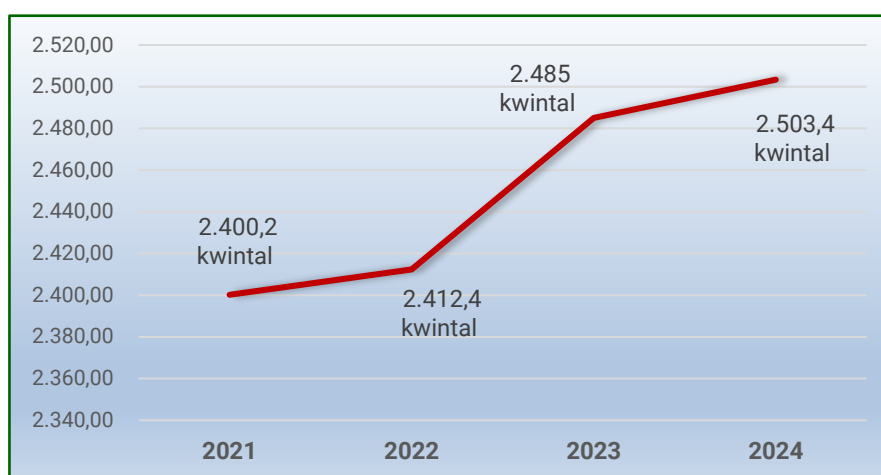
Pada tahun 2024 produksi ikan konsumsi mencapai 2.503,40 kwintal atau mencapai 100,57% dari target sebesar 2.489,33 kwintal. Produksi ikan konsumsi juga mengalami kenaikan tipis sebesar 0,74% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023.

Tabel 3.12
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2021-2024



Komoditas ikan konsumsi yang dibudidayakan di Kota Blitar adalah lele, gurami, nila, patin, gabus, majalaya dan bawal. Komoditas ikan lele memberikan kontribusi paling besar pada produksi ikan konsumsi yang kemudian diikuti dengan komoditas lainnya seperti gurami, nila, patin dan lainnya. Walaupun begitu setiap tahunnya preferensi jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan mengalami perubahan tergantung terhadap permintaan pasar. Perkembangan produksi ikan konsumsi berdasarkan jenisnya tahun 2021-2024 disajikan pada diagram berikut ini.

Grafik 3.13
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2021-2024



Secara umum perkembangan produksi ikan konsumsi mulai tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang positif. Komoditas yang cenderung terus mengalami kenaikan adalah jenis Ikan Lele. Selain itu, ikan lele merupakan penyumbang terbesar produksi ikan konsumsi yaitu sebesar 47,85% dari jumlah produksi total. Sedangkan untuk produksi jenis lainnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 produksi ikan lele, Gurami dan lainnya (Gabus, Majalaya, Bawal) mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,44% , 1,56% dan 1,49%. Sedangkan untuk jenis ikan Nila dan Patin mengalami penurunan sebesar 11,92% dan 2,44%. Pada tahun 2024, secara keseluruhan produksi ikan konsumsi mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi kekeringan panjang akibat dampak el-nino, budiadaya perikanan di Kota Blitar mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan,



pendampingan dan pelatihan serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan (keskanling) kepada pembudidaya di Kota Blitar. Pembudidaya ikan di Kota Blitar pada tahun 2024 sejumlah 467 orang dan sebanyak 65,31% telah mendapatkan pelatihan/pendampingan. Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pelatihan budidaya ikan air tawar dan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) sebagai upaya untuk peningkatan produksi serta pemanfaatan lahan kosong. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (CPIB dan CBIB). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah perekonomian bagi pembudiaya.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat 5 kelompok perikanan (Pokdakan Mina Sejati Kel. Karangsari, Pokdakan Bader Bang Sisik Kencono Kel. Karangtengah, Pokmas Pemuda Riau Kel. Sanawetan, Pokmas Nirwana Jaya Kel. Rembang dan Pokmas Sawit Sejahtera Kel. Plosokerep) yang mendapatkan bimbingan teknis Sinergitas Kawasan Agropolitan Komoditas Lele dan Nila, Budidaya Lele Bioflog dan bantuan sarana prasarana budidaya perikanan dari APBD I melalui Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan mendapatkan bimbingan teknis dan bantuan sarana prasarana tersebut mampu meningkatkan produksi ikan konsumsi di Kota Blitar.

Dalam peningkatan produksi ikan konsumsi ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong yaitu :

1. Antusiasme pembudidaya ikan terhadap perkembangan teknologi budidaya ikan.
2. Adanya bantuan sarana prasarana yang berasal dari APBD Propinsi maupaun APBN.
3. Adanya pendampingan dan pelatihan budidaya perikanan darat oleh narasumber yang kompeten.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi ikan konsumsi adalah :



1. Kekeringan panjang sebagai dampak fenomena el – nino, menyebabkan penurunan debit air sehingga sebagian pembudidaya mengurangi populasi ikan yang dibudidayakan.
2. Ketersediaan benih ikan yang berkualitas belum optimal.
3. Masih banyaknya pembudidaya perikanan yang belum memiliki sertifikat standar mutu.

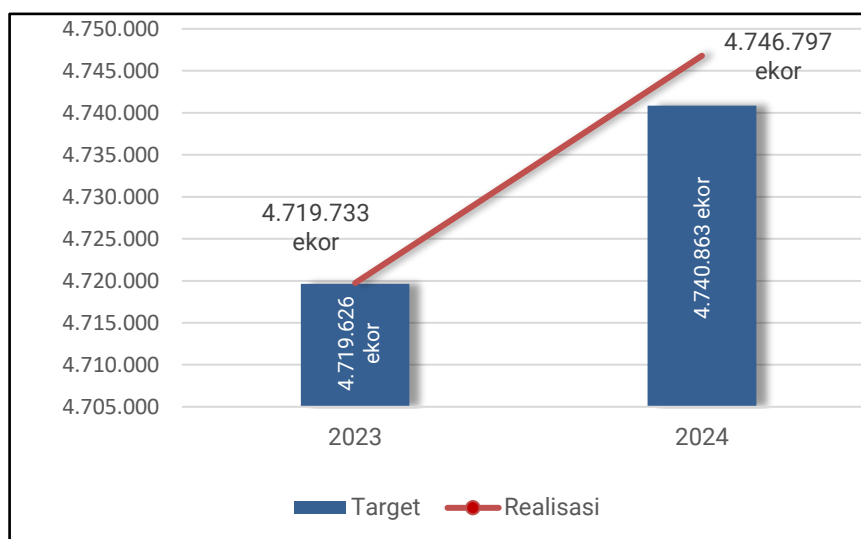
Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan (Keskanling) harus dilaksanakan secara berkala.
2. Pelatihan dan pembinaan kepada kelompok perikanan tentang standar mutu baik untuk peningkatan produktivitas kolam maupun kualitas benih yang dihasilkan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas UPT PBAT sebagai salah satu penyedia benih ikan konsumsi.

Indikator Kinerja 4 : Produksi hasil budidaya ikan hias

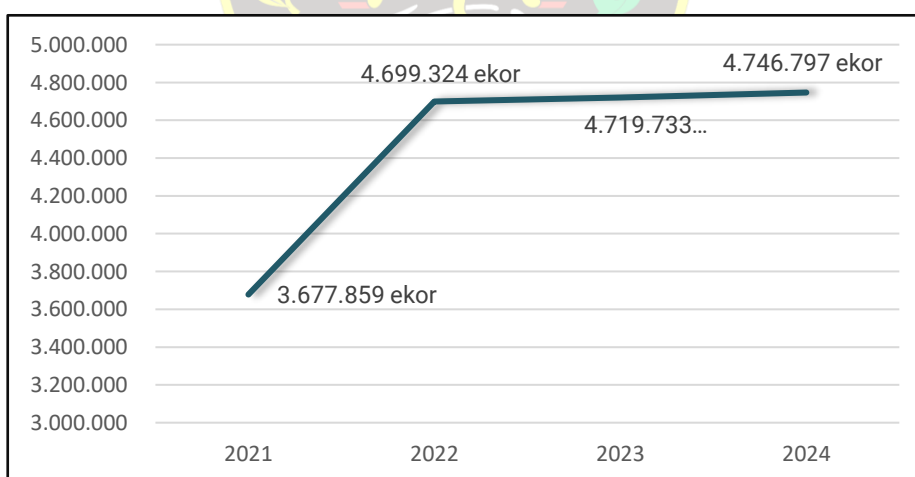
Kota Blitar dikenal sebagai penghasil ikan hias terutama ikan koi. Selain Ikan Koi sebagai komoditas utama, ada beberapa jenis ikan hias lainnya yang dibudidayakan di Kota Blitar. Budidaya ikan hias mampu memberikan kontribusi yang bagus untuk pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Pada tahun 2024 jumlah produksi ikan hias mencapai 4.746.797 ekor, mencapai 100,13 % dari target sebesar 4.719.626 ekor. Produksi ikan hias pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan kondisi pada tahun 2023. Produksi ikan hias tahun 2023-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.14
Produksi Ikan Hias (Ekor) Tahun 2023-2024



Perkembangan produksi ikan hias mulai tahun 2021-2024 cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi mulai tahun 2022-2024 peningkatan produksi ikan hias cenderung stagnan atau mengalami kenaikan sangat sedikit.

Grafik 3.15
Produksi Ikan Hias (Ekor) Tahun 2021-2024



Komoditas ikan hias yang dibudidayakan paling banyak selain ikan koi, adalah ikan manvis, cupang, sepat dan sebaigian kecil dari jenis guppy, goldenblack, chana dan mas koki. Seperti pada budidaya ikan konsumsi, preferensi jenis ikan pada budidaya ikan hias sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Produksi ikan Koi

merupakan penyumbang terbesar dalam produksi ikan hias di Kota Blitar yaitu sebesar 37,17% dari total jumlah produksi ikan hias. Perkembangan produksi budidaya ikan hias berdasarkan jenisnya pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tabel 3.4
Produksi Ikan Hias Menurut Jenisnya (Ekor) Tahun 2021-2024

Tahun	Jenis					Jumlah
	Koi	Manvis	Sepat	Cupang	Lainnya (Guppy, Goldenblack, Chana, Mas Koki)	
2021	1.744.904 ekor	1.003.971 ekor	748.030 ekor	110.276 ekor	70.678 ekor	3.677.859 ekor
2022	1.940.777 ekor	992.487 ekor	737.891 ekor	957.195 ekor	70.974 ekor	4.699.324 ekor
2023	1.818.598 ekor	987.404 ekor	720.021 ekor	1.122.807 ekor	70.903 ekor	4.719.733 ekor
2024	1.764.400 ekor	855.819 ekor	885.554 ekor	1.169.740 ekor	71.284 ekor	4.746.797 ekor

Jumlah pembudidaya ikan hias di Kota Blitar sebanyak 98 pembudiaya. Selain pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada pembudiaya ikan hias, untuk meningkatkan produksi dan jangkauan pemasaran pada tahun 2024 juga dilaksanakan promosi ikan hias yang dikemas dalam bentuk kontes dan lelang Ikan hias Kota Blitar yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pengiat dan komunitas ikan hias di Kota Blitar (Kontes Koi) serta mengikuti even tingkat nasional Nautica Koi Show.

Selain komoditas ikan konsumsi, pada tahun 2024 Kota Blitar juga mendapatkan bantuan sarana prasarana budidaya ikan koi dari APBD I melalui Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur kepada 1 kelompok perikanan yaitu Pokdakan Mina Usaha Tani Kel. Ngadirejo. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan produksi dan kualitas ikan hias di Kota Blitar sehingga lebih mampu bersaing di pasaran.

Dalam peningkatan produksi ikan hias ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong yaitu :

1. Antusiasme pembudidaya ikan terhadap perkembangan teknologi budidaya ikan hias.

2. Adanya bantuan sarana prasarana yang berasal dari APBD Propinsi maupaun APBN.
3. Tersedianya fasilitas promosi melalui even kontes dan bursa untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi ikan hias adalah :

1. Kekeringan panjang sebagai dampak fenomena el – nino, menyebabkan penurunan debit air sehingga sebagian pembudidaya mengurangi populasi ikan yang dibudidayakan.
2. Ketersediaan benih ikan yang berkualitas belum optimal.
3. Masih banyaknya pembudidaya perikanan yang belum memiliki sertifikat standar mutu.
4. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran terutama untuk jenis selain koi.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan (Keskanling) harus dilaksanakan secara berkala.
2. Pelatihan dan pembinaan kepada kelompok perikanan tentang standar mutu baik untuk peningkatan produktivitas kolam maupun kualitas benih yang dihasilkan.
3. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas even kontes/bursa yang dilaksanakan serta penyediaan portal digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

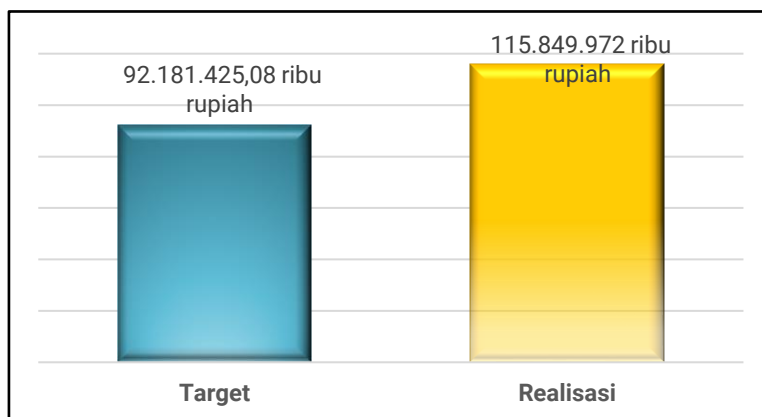
A.1.3 Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan

Indikator Kinerja 1 : Nilai produksi hasil pertanian

Nilai produksi hasil pertanian mengacu pada total nilai ekonomi dari produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual produk ditingkat produsen. Nilai produksi hasil pertanian baru dihitung pada tahun 2024 dan merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2021-2026. Target dan capaian nilai produksi hasil pertanian disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.16

Target dan Realisasi Nilai Produksi Pertanian Tahun 2024



KOTA BLITAR

Pada tahun 2024 nilai produksi pertanian sebesar 115.849.972 ribu rupiah mencapai 125,68% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 produksi pertanian mengalami penurunan sebagai dampak el nino pada tahun 2023. Hal ini berkontribusi terhadap kenaikan harga komoditas pertanian terutama padi dan jagung. Sebagai upaya meningkatkan nilai produksi pertanian, selain upaya peningkatan produksi melalui intensifikasi juga telah dilaksanakan pendampingan dan pelatihan tentang peningkatan nilai tambah produk melalui pengemasan dan juga pemasaran kepada kelompok tani di Kota Blitar.

Beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong peningkatan nilai produksi pertanian yaitu :

1. Permintaan pasar yang tinggi akibat menurunnya produksi hasil pertanian sebagai dampak cuaca ekstrem (el nino).
2. Inovasi produksi padi sehat yang dikelola secara menyeluruh oleh kelompok tani.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat peningkatan nilai produksi pertanian adalah :

1. Masih kurangnya diversifikasi produk sehingga sangat tergantung pada produksi tanaman pangan.

2. Belum optimalnya kebijakan harga produk hasil pertanian sehingga saat panen raya harga komoditas cenderung mengalami penurunan.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

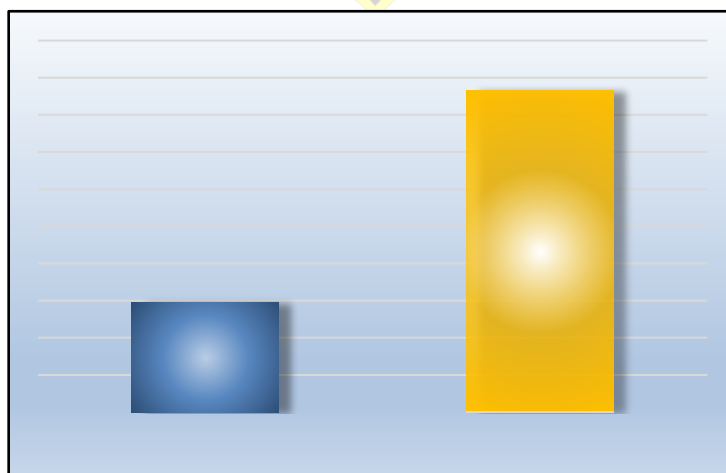
1. Peningkatan diversifikasi produk melalui penerapan urban farming dan pemanfaatan lahan kosong untuk komoditas selain tanaman pangan.
2. Peningkatan nilai tambah terhadap produk hasil pertanian melalui pelatihan teknologi/inovasi, pembimnaan dan pendampingan kepada kelompok tani binaan.
3. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi maupun fasilitasi dalam pameran.

Indikator Kinerja 2 : Nilai produksi hasil perikanan

Nilai produksi hasil pertanian mengacu pada total nilai ekonomi dari produk perikanan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu mencakup produksi ikan segar, ikan hias dan olahan hasil perikanan. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual produk ditingkat produsen. Nilai produksi hasil perikanan baru dihitung pada tahun 2024 dan merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2021-2026. Target dan capaian nilai produksi hasil perikanan disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.17

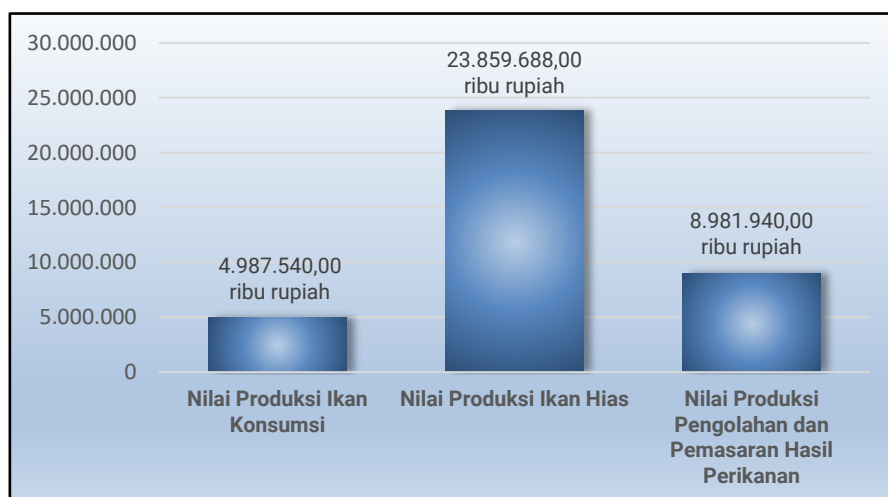
Target dan Realisasi Nilai Produksi Perikanan Tahun 2024



Pada tahun 2024 nilai produksi perikanan sebesar 37.829.168 ribu rupiah mencapai 108,15% dari target yang telah ditetapkan. Nilai produksi didapat dari nilai produksi ikan segar, ikan hias dan pengolahan/pemasaran hasil perikanan.

Grafik 3.18

Nilai Produksi Perikanan Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2024



Nilai produksi hasil perikanan paling besar berasal dari nilai produksi ikan hias sebesar 23.859.688,00 ribu rupiah atau sebesar 63,07% dari jumlah keseluruhan nilai produksi perikanan. Sedangkan nilai produksi pengolahan dan pemasaran menyumbang sebesar 23,74% dan nilai produksi ikan konsumsi sebesar 13,18%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan di Kota Blitar sangat tergantung pada sektor ikan hias. Selain dikarenakan ikan hias memiliki nilai jual yang lebih tinggi, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya komunitas atau asosiasi (Blitar Koi Club, dll) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan didapat dari omset penjualan kelompok pengolah dan pemasar (Poklasar) yang sangat tergantung pada kuantitas, kualitas dan diversifikasi produk yang dipasarkan.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai produksi pertanian yaitu :

1. Kota Blitar sudah dikenal sebagai penghasil Ikan Koi berkualitas

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi.
3. Semakin bervariasinya bentuk olahan hasil perikanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat (frozen food).

Beberapa faktor yang menjadi penghambat peningkatan nilai produksi perikanan adalah :

1. Masih kurangnya diversifikasi produk yang diproduksi oleh pelaku usaha olahan hasil perikanan sehingga kurang bisa memenuhi permintaan pasar dan masih didominasi oleh produksi dari luar.
2. Belum optimalnya jangkauan pemasaran baik untuk konsumsi, ikan hias maupun olahan hasil perikanan.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

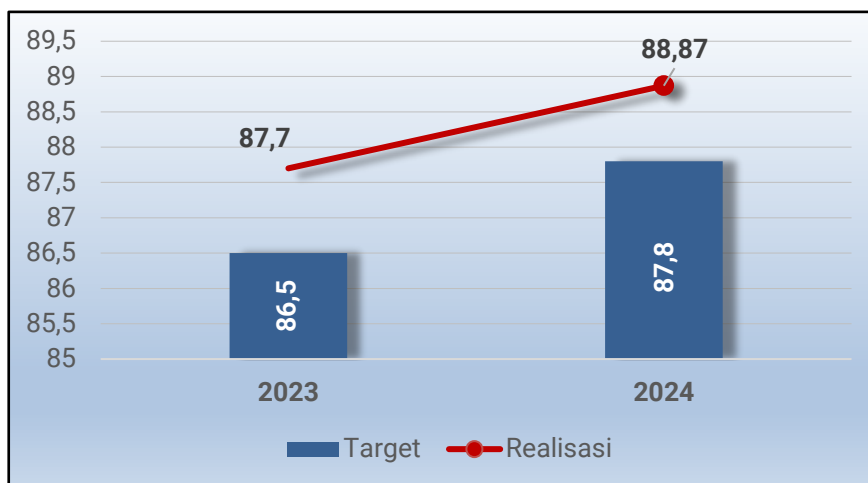
1. Peningkatan diversifikasi produk melalui pelatihan olahan hasil perikanan kepada poklasar.
2. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi maupun fasilitasi dalam pameran serta fasilitasi terhadap komunitas/asosiasi ikan hias.

A.1.4. Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat

➤ Indikator Kinerja : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

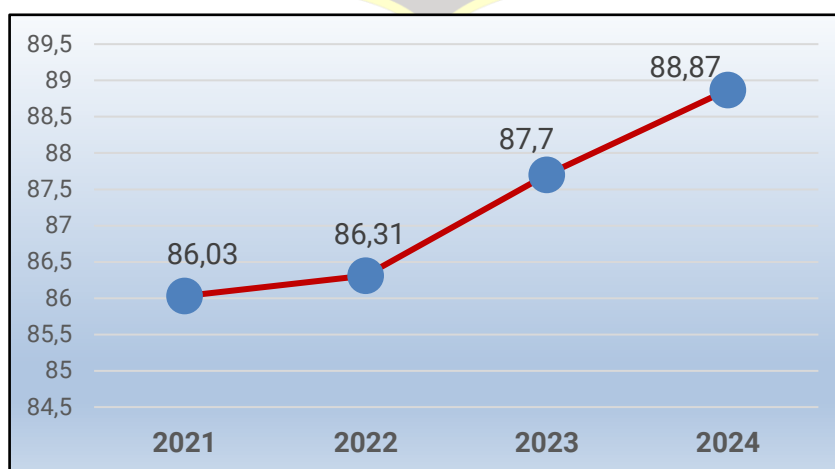
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk tidak hanya untuk dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi menunjukkan situasi konsumsi pangan yang semakin beragam, seimbang dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Diagram 3.3
Skor PPH Konsumsi Tahun 2023-2024



Skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dari 87,7 pada Tahun 2023 menjadi 88,87 pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 1,33%. Realisasi Skor PPH Tahun 2024 mencapai 101,39% dari target sebesar 87,8 dengan kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat meningkat dibandingkan pada Tahun 2023. Penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dilakukan melalui pendekatan analisis konsumsi pangan. Analisis konsumsi pangan dilakukan melalui survey konsumsi pangan di 21 kelurahan untuk mengetahui pola konsumsi dan tingkat konsumsi energi masyarakat.

Grafik 3.4
Tren PPH Konsumsi Tahun 2021-2024



Perkembangan Skor PPH Konsumsi mulai tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pola konsumsi pangan masyarakat setiap tahunnya terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel. 3.2
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar
Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kkal/Kapita	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	Ket
1	Padi-padian	1.283,39	59,47	59,69	0,50	29,74	29,85	25,00	25,00	+
2	Umbi-umbian	53,19	2,46	2,47	0,50	1,23	1,24	2,50	1,24	-
3	Pangan Hewani	232,25	10,76	10,80	2,00	21,52	21,60	24,00	21,60	-
4	Minyak dan Lemak	103,37	4,79	4,81	0,50	2,40	2,40	5,00	2,40	-
5	Buah/Biji Berminyak	69,68	3,23	3,24	0,50	1,61	1,62	1,00	1,00	+
6	Kacang-Kacangan	129,13	5,98	6,01	2,00	11,97	12,01	10,00	10,00	+
7	Gula	75,77	3,51	3,52	0,50	1,76	1,69	2,50	1,69	-
8	Sayur dan Buah	111,55	5,17	5,19	5,00	25,85	25,94	30,00	25,94	-
9	Lain-lain	99,68	4,62	4,64	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.158,01	100	100,37		96,07	96,36	100	88,87	

Sumber : Laporan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2024 (AKE : 2150 kkal/kap/hari)

Keterangan:

(+) adalah kelompok bahan makanan yang mencapai skor PPH maksimum

(-) adalah kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor PPH maksimum

Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2024 didapatkan hasil bahwa konsumsi kelompok padi-padian mencapai skor 29,85 dari skor maksimal 25,0 dengan konsumsi energi sebesar 1.283,39 kkal/kapita/hari dimana 87,16 % nya berasal dari beras. Konsumsi beras mengalami kenaikan sebesar 2,42% dibandingkan dari tahun 2023 yang mencapai 1.258 kkal/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi beras sebagai sumber kalori masih cukup tinggi. Sehingga perlu adanya keberlanjutan pelatihan diversifikasi pangan dan sosialisasi pola pangan seimbang (B2SAH) dengan sasaran yang lebih beragam.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja Skor PPH adalah :

1. Peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui pembinaan KWT pengelola P2L, pemberian bahan makanan tambahan untuk balita gizi kurang, pelatihan diversifikasi pangan untuk pemenuhan pangan yang Beragam Bergizi Sehat Aman dan Halal (B2SAH).

2. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Kota Blitar mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Badan Pangan Nasional berupa Bantuan Pangan Beras (BPB) sebanyak 8.469 keluarga penerima manfaat dan Bantuan Keluarga Resiko Stunting (KRS) sebanyak 1.125 keluarga penerima bantuan.
3. Posisi Kota Blitar sebagai kota perdagangan turut memberikan keuntungan dengan adanya perdagangan antar wilayah sekitar (Kab. Blitar, Kab. Tulungagung) sehingga ketersediaan pangan cukup untuk masyarakat Kota Blitar.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat adalah :

1. Tingginya preferensi beras sebagai sumber pangan utama, sehingga penganeekaragaman pangan masih belum optimal.
2. Pada tahun 2024 masih terjadi Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok (beras, telur, daging, cabe) sehingga pengeluaran pangan lebih untuk pemenuhan bahan pangan pokok yaitu beras.

Beberapa upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi pola pangan B2SAH, Promosi Gemarikan pada usia anak sekolah (SD) untuk meningkatkan konsumsi ikan dan Pemberian bantuan PMT untuk balita rawan stunting secara masif.
2. Pemantauan harga pangan setiap hari dan gerakan pemanfaatan lahan kosong melalui urban farming dengan memberdayakan KWT dan PKK.

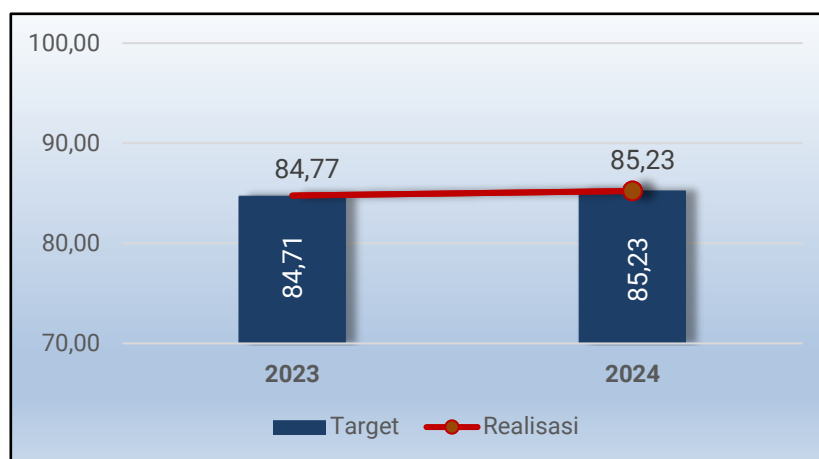
A.1.5 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

➤ Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah

integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Grafik. 3.5
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
Tahun 2023 - 2024



Hasil evaluasi dari implemenetasi SAKIP Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan perdikat A (memuaskan) dengan nilai 85,23 atau sebesar 100,00% dari target yang telah di tetapkan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Angka ini mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya yaitu 84,77.

Dari hasil evaluasi di dapatkan bahwa nilai perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar mengalami kenaikan dari 24,37% menjadi 27,11%. Kenaikan capaian ini dikarenakan telah dilakukannya review indikator kinerja tujuan sehingga lebih menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan telah memenuhi kriteria SMART, review Dokumen Renstra secara berkala, pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja untuk mengukur kinerja serta seluruh pegawai telah menyusun SKP dan berkomitmen dalam pencapaian kinerja. Selain itu perbaikan target kinerja juga telah dilaksanakan melalui P-Renja 2024 sehingga lebih realistis dan menantang .

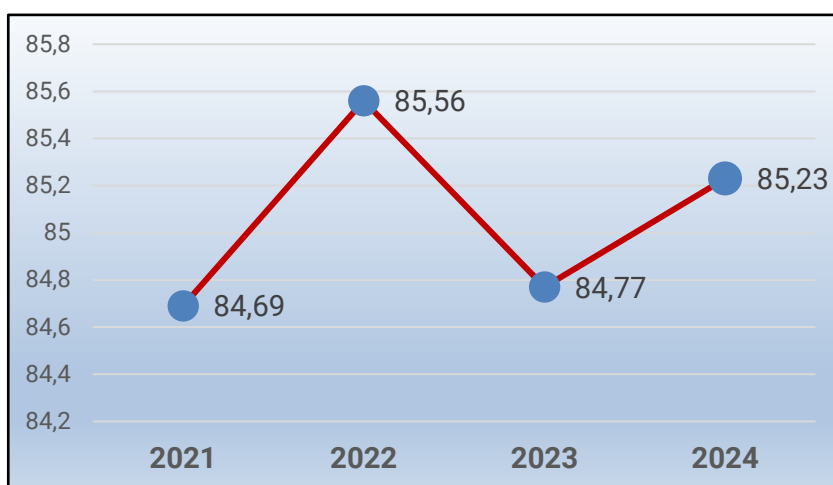
Sedangkan dalam aspek pengukuran kinerja mengalami penurunan dari 25,67% menjadi 22,89%. Pengukuran kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian telah dilaksanakan secara periodik dan berjenjang. Selain itu pengukuran capaian kinerja telah didukung dengan data kinerja yang cukup relevan, telah memanfaatkan teknologi informasi (A-SAKIP) untuk pengukuran kinerja tribulanan, telah dilengkapi dengan definisi operasional indikator kinerja, SOP dan telah menerapkan ketercapaian pengukuran kinerja dalam aplikasi e-Kinerja sebagai dasar dalam pemberian TPP. Akan tetapi pengumpulan data dukung kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi (aplikasi). Oleh karenanya perlu adanya pengembangan aplikasi pengumpulan data kinerja yang mampu menyajikan data dukung kinerja yang akuntabel, relevan dan realtime.

Untuk aspek pelaporan kinerja juga mengalami sedikit penurunan dari 14,73% pada tahun 2023 menjadi 14,61% pada tahun 2024. Dalam aspek pelaporan kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui website. Laporan kinerja telah dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pelaksanaannya. Akan tetapi masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami dan peduli atas informasi dalam laporan kinerja. Kedepan perlu dilaksanakan internalisasi informasi yang tertuang dalam laporan kinerja melalui ekpose laporan kinerja secara berkala (tribulanan dan tahunan).

Untuk aspek Evaluasi Internal tidak mengalami perubahan yaitu 20,63% pada tahun 2023 dan 2024. Evaluasi internal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai akan tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta efektivitas dan efisiensi kinerja. Sehingga kedepan perlu dilaksanakan sosialisasi tentang hasil evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja untuk masing-masing penanggungjawab kinerja individu maupun organisasi.

Grafik 3.6
Perkembangan Nilai SAKIP Tahun 2021-2024



Perkembangan nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 akan tetapi dengan langkah perbaikan yang telah dilaksanakan nilai sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali naik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa langkah perbaikan yang telah dilaksanakan mampu memberikan efek positif terhadap penerapan Sakip di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

Faktor pendorong implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah :

1. Seluruh pegawai telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan berkomitmen dalam pencapaiannya.
2. Telah dilakukan review dokumen perencanaan secara berkala.
3. Pengukuran kinerja sudah didukung dengan data yang relevan.
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan memanfaatkan teknologi informasi (ASAKIP).

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

1. Hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya peduli dengan hasil laporan kinerja.
3. Pengumpulan data dukung kinerja belum memanfaatkan teknologi aplikasi (aplikasi).

Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Melaksanakan monev kinerja secara berkala dan internalisasi laporan kinerja.
2. Optimalisasi aplikasi data yang dimiliki (SIPETANI) untuk pengumpulan data kinerja.



A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	213,52 milyar rupiah	200,43 milyar rupiah
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	240.477kwintal	173.776,40kwintal
	Jumlah produksi hasil peternakan	100.122,81 kwintal	104.314,32 kwintal
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.485,00 kwintal	2.503,40 kwintal
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.719.733 ekor	4.742.797 ekor
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	-	115.849.972 ribu rupiah
	Nilai produksi hasil perikanan	-	37.829.168 ribu rupiah
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,7	88,87
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,77 (A)	85,23 (A)

Sebagain besar capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Skor PPH konsumsi juga mengalami kenaikan dari 87,7 pada tahun 2023 menjadi 88,87 pada tahun 2024. Jumlah produksi hasil peternakan naik dari 100.122,81 kwintal pada tahun 2023 menjadi 104.314,32 kwintal pada tahun 2024. Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi dan ikan hias masing – masing mengalami kenaikan dari 2.485,00 kwintal dan 4.719.733 ekor pada tahun 2023 menjadi 2.503,40 kwintal dan 4.742.797 ekor pada tahun 2024. Demikian juga untuk capaian indikator nilai sakip mengalami kenaikan dari 84,77 pada tahun 2023 menjadi 85,23 pada tahun 2024. Sedangkan untuk indikator kinerja PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 12,13% dari 213,52 milyar pada tahun 2023 menjadi 200,43 milyar pada tahun 2024. Demikian juga

untuk indikator jJumlah produski tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan sebesar 27,74% dari 240.477 kwintal pada tahun 2023 menjadi 173.776,40 kwintal.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target S/D Akhir Periode Renstra

Tabel. 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	200,79 Milyar Rupiah	200,43 milyar rupiah	114,76
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.563,73 kwintal	173.776,40 kwintal	87,52
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	85.356,30 kwintal	104.314,32 kwintal	122,21
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.549,33 kwintal	2.503,40 kwintal	98,20
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.783.627 ekor	4.742.797 ekor	99,15
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	95.905.554,00 ribu rupiah	115.849.972,00 ribu rupiah	120,80
	Nilai produksi hasil perikanan	36.390.897,28 ribu rupiah	37.829.168,00 ribu rupiah	103,95
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	88,5	88,87	100,42
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,77	85,23	100,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa target akhir Renstra telah terpenuhi dengan capaian diatas 85% bahkan untuk beberapa indikator mencapai 100%. Indikator Nilai Sakip mencapai 100,54%, PDRB Kategori Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mencapai 114,76%, Skor PPH Konsumsi mencapai 100,42%, produksi tanaman pangan dan hortikultura mencapai 87,52%, produksi hasil peternakan mencapai 122,21%, produksi budidaya ikan konsumsi mencapai 98,20%, produksi hasil budidaya ikan mencapai 99,15%, nilai produksi hasil pertanian mencapai 120% dan nilai produksi hasil perikanan mencapai 103,95% Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel. 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL DAN DAERAH SEKITAR

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Prop. Jawa Timur 2024	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
					Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	Kota Pasuruan	
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,43 milyar	-	177.789,80 milyar	220,17 mliyar	132,31 milyar	397,35 milyar	240 milyar	Sumber BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga masih berada di bawah dari capaian Kota Malang, Kota Kediri, Kota Pasuruan tapi masih diatas capaian Kota Madiun.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN / COST PER OUTCOME

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (*cost per outcome*). Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan dalam penghitungan akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio Ekonomi}}$$

Bila Rasio Efisiensi > 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya EFISIEN. Sebaliknya, bila Rasio Efisiensi < 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya TIDAK EFISIEN.

B.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel. 3.7
ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sasaran Startegis	Indikator	Anggaran	% Anggaran
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.008.003.206,00	42,77
- Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	4.062.564.800,00	24,79
- Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	677.845.114,00	4,14
- Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	307.238.378,00	1,88
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias		
- Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	28.012.400,00	0,17
	Nilai produksi hasil perikanan	1.932.342.514,00	11,79
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	178.231.400,00	1,09
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	9.199.095.706,00	56,14
		16.385.330.312	100,00

Secara keseluruhan alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.385.330.312,00. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran mulai dari yang tersebsar adalah untuk sasaran startegis meningkatnya kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 9.199.095.706,00 atau sebesar 56,14%, terjaganya produkstivitas pertanian dan perikanan sebesar Rp. 7.008.003.206,00 atau sebesar 42,77%, kemudian untuk tercukupinya konsumsi pangan masyarakat sebesar Rp. 178.2310.400,00 atau sebesar 1,09. Selanjutnya untuk anggaran pendukung pencapaian terjaganya produkstivitas pertanian dan perikanan dibandingkan dengan jumlah total anggaran yang tersedia alokasi terbesar adalah untuk terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikutura sebesar Rp. 4.062.564.800,00 (24,79%), meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan

perikanan sebesar Rp. 1 1.960.354.914,00 (11,96%), terjaganya produksi hasil peternakan sebesar Rp. 677.845.114,00 (4,14%) dan terjaganya produksi hasil perikanan sebesar Rp. 307.238.378,00 (1,88%).

B.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Tabel. 3.8
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Sasaran Startegis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	213,52	213,52	100,00	7.008.003.206	6.906.304.914	98,55
- Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141,40	173.776,40	78,94	4.062.564.800	4.012.877.515	98,78
- Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	100.123,00	104.314,32	104,19	677.845.114	659.434.050	97,28
- Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.489,33	2.503,40	100,57	307.238.378	301.152.900	98,02
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.740.863	4.742.797	100,04			
- Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	92181425,08	115.849.972,00	125,68	28.012.400	27.762.400	99,11
	Nilai produksi hasil perikanan	34977794,39	37.829.168,00	108,15	1.932.342.514	1.905.078.049	98,59
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,7	88,87	101,33	178.231.400	175.458.450	
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	85,23	85,23	100,00	9.199.095.706	9.108.254.559	99,01
	Jumlah				16.385.330.312	16.190.017.923	98,81



Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.190.017.923 atau sebesar 98,81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.385.330.312. Dana tersebut digunakan dalam upaya pencapaian sasaran startegis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 dengan capaian rata-rata 100%.

B.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.9
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sasaran Startegis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,00	98,55	1,01	Efisien
- Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	78,94			
- Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	104,19			
- Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	100,57			
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	100,04			
- Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	125,68			
	Nilai produksi hasil perikanan	108,15			
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	101,33	98,44	1,03	Efisien
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	100,00	99,01	1,01	Efisien

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja rata-rata diatas 1. Semakin tinggi rasio efisiensi berarti semakin efisien dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Untuk sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat sebesar 1,03 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 101,33% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,44% dan dikategorikan EFISIEN. Untuk sasaran terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan tingkat efisiensinya sebesar 1,01% yang



berarti untuk mencapai target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,55% dan dikategorikan EFISIEN. Efisiensi pencapaian target kinerja tersebut dengan indikator kinerja PDRB kategoripertanian, kehutanan dan perikanan didukung oleh pencapaian kinerja terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura, terjaganya produksi hasil peternakan, terjaganya produksi hasil perikanan dan meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan. Rasio efisiensi untuk sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah mencapai 1,04, tercukupinya konsumsi pangan mencapai 1,01 yang berarti untuk mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,01% dan dikategorikan EFISIEN. Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

1. Nilai Sakip OPD Tahun 2024 dengan Predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,23;
2. Unit Kerja dengan Penyampaian Data Daerah Dalam Anmga Tahun 2023 Tercepat, Terlengkap, Terakurat dari BPS Kota Blitar;
3. Juara 3 Lomba Cipta Menu B2SA dalam rangka Hari Pangan Sedunia dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
4. Terbaik 2 SATA AWARD Kota Blitar dari Dinas Informasi dan Statistik Kota Blitar;
5. Kontributor Kota Blitar Dalam Angka Kategori Perangkat Daerah dengan penyampaian data terbanyak, tercepat dan terakurat dari BPS Kota Blitar.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2024.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar 2021-2026, dokumen Renja 2024, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yang terdiri atas tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2024 mencapai 200,43 milyar rupiah dan mencapai 93,87% dari target sebesar 213,52 milyar rupiah. Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 sebesar 88,87 point atau sebesar 101,33% dari target sebesar 87,7 point. Kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2024 mencapai 85,23 point atau mencapai 100% dari target daerah. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 173.776,40 kwintal atau mencapai 78,94% dari target sebesar 220.141,40 kwintal. Capaian produksi hasil peternakan pada tahun 2024 sebesar 104.314,32 kwintal mencapai 104,19% dari target sebesar 100.123 kwintal. Indikator sasaran produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2024 untuk produksi hasil budidaya ikan konsumsi sebesar 2.503,40 kwintal mencapai 100,57% dari target sebesar 22.489,33 kwintal, produksi hasil ikan hias sebesar 4.742.797 ekor mencapai



100,04% dari target sebesar 4.740.863 ekor, nilai produksi hasil pertanian terealisasi sebesar 115.849.972 ribu rupiah atau sebesar 125,68% dari target 92.181.425,08 ribu rupiah dan nilai produksi hasil perikanan terealisasi sebesar 37.829.168 ribu rupiah atau sebesar 108,15 % dari target 34.977.794,39 ribu rupiah.

Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024 masuk dalam kategori **Sangat berhasil** dan **Berhasil**. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. SARAN

Dari hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perlunya upaya yang lebih efektif dan efisien dalam penjaminan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan /atau sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian.	Pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan pendampingan PTPS	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	√		
2	Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Konsultasi LP2B dengan Kemenkumham	- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian - Sub kegiatan penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota			√
3	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√		
		Sosialisasi evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi		√		
4	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan pemasaran hasil perikanan dengan pemanfaatan platform digital	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil			√
		Pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan				√
5	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	√	√	



Demikian, semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 Pebruari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN



Drh. DEWI MASITOH., M.Agr.

Pembina Tingkat 1 (IVb)

NIP 197906122026042005



LAMPIRAN 1.

Matrik Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat
Misi : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan) IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	73,38	74,68	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	86,75	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Urusan Pangan
	Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita	Rata-rata pengeluaran untuk pangan per kapita (Rp.) di bagi Rata-rata pengeluaran total per kapita (Rp.) di kalikan 100%	NA	42,36							Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya	
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutan an, dan Perikanan (milyar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	197,81	198,8	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.325,67	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Urusan Pertanian
	Nilai Tukar Petani	NTP = $IT/IB \times 100\%$ IT : Indeks Harga Yang Diterima Petani IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Petani	NA	101,67							Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTP = $IT/IB \times 100\%$ IT : Indeks Harga Yang Diterima Pembudiaya ikan IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Pembudidaya Ikan	NA	101							Peningkatan kapasitas SDM petani	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					KOTA BLITAR	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	83.818	84.827,72	Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis	
											Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
											Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
											Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
											Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
											Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan	Urusan Perikanan
											Peningkatan pemenuhan benih ikan	
						Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2310,3	2489,33	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	
							Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.740.863		

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian (000 rupiah)	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	NA	92.181.425	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital	Urusan Pertanian
						Nilai produksi hasil perikanan (000 Rupiah)	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)	NA	34.977.794	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital	Urusan Perikanan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,73	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,73	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	

Blitar, 3 Januari 2024
 Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Drh. DEWI MASITOH, M.Agr.
 Pembina (Iva)
 NIP. 19791206 200604 2 005

LAMPIRAN 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran	
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,73	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4.931.296	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	102.454.300	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	6.563.385.364	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	2.770.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	38.000.000	
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98	77.090.472	

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	59.900.100
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	46.266.100
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	65.243.000
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	9.581.000
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	23.278.000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	14.940.000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	199.980.000
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	15.675.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	41.224.800
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	154.617.200

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	1.238.728.335
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	110.808.000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	63.171.900
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	367.050.839
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,70	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka ketersediaan energi perkapita/hari	2200	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	2.923.600
					2133	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ tahun)	57	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	58.600.100
				Angka konsumsi energi per kapita					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	53.251.800

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	60	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2	53.205.700
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	100	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	10.250.200
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi Produksi hasil budidaya ikan hias	2.489,33 4.740.863,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	21,55 15,07	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	50	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2	102.535.400
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	4,75	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	49.748.100
									Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	120.000.128
									Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40	34.954.750

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil perikanan	34.977.794,39	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan	34572	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	26,09	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2	24.147.400
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	21,2	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	61.952.100
									Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20	1.846.243.014
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141,40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	50	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	60	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2	373.642.900
				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	97,75				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	253.752.700

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
				Persentase sarana pertanian yang tersedia	73	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	30	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	53.535.700
					100	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2	23.928.700
									Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	8.921.800
						Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	95,2	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	4.792.200
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	69,55	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	84.320.000
					100				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2	185.168.400
						Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70,61	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	611.250.000
							Presentase prasarana RPH yang ditingkatkan	70	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	611.250.000

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
									Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	349.998.620
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi hasil peternakan	100.123,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	42	41.055.400
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	55,56	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	85	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	29.015.850
				Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	44	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	87,75	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5	120.088.694
									Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	8.619.300
									Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21	14.252.200
									Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8	12.313.800
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100	Pengendalian dan Penanggulangan bahan pengendalian OPT Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	17	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	100	16.041.000

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
										Perkebunan yang Dikendalikan		
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	14,29 30,56 0,93	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	40	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	72.465.800
									Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	1.850.000.000
									Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	4.674.000
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai Produksi Hasil Pertanian	92.181.425,08	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	41,66	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	24	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2	28.012.400
				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	44,62	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	3	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2	5.524.800

Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran
						Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1	5.798.050

KOTA BLITAR

Blitar, 23 September 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



drh. DEVI MASITOH, M.Agr.

Pembina Tingkat 1 (IVb)

NIP. 197912062006042005

LAMPIRAN 3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

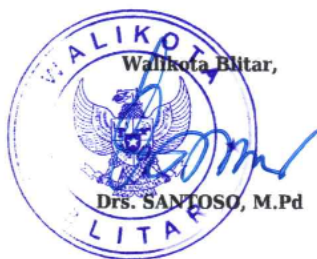
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drh. DEWI MASITOH, M.Agr.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	213.52(milyar rup)
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	220141.40(kwintal)
		Produksi hasil peternakan	100123.00(kwintal)
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2489.33(kwintal)
		Produksi hasil budidaya ikan hias	4740863.00(ekor)
3	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	92181425.08(000 Rupiah)
		Nilai produksi hasil perikanan	34977794.39(000 Rupiah)
4	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.70(angka)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.23(angka)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,927,139,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,932,342,514.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39,335,250.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10,250,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	16,041,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53,205,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	307,238,378.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225,345,244.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	114,775,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,841,987,020.00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian,Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	718,574,000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,199,095,706.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal
Total:		16,385,330,312.00	



LAMPIRAN 4.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
1	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	213,52	200,43	93,87	Berhasil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	307.238.378,00	301.152.900,00	98,02	
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	220.141,40	173.776,40	78,94	Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	718.574.000,00	706.062.000,00	98,26	
		Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	100.123,00	104.314,32	104,19	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.841.987.020,00	1.800.025.350,00	97,72	
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2.489,33	2.503,40	100,57	Sangat Berhasil	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.345.244,00	223.435.750,00	99,15	
		Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.740.863	4.742.797	100,04	Sangat Berhasil	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.041.000,00	16.041.000,00	100,00	
								Program Penyuluhan Pertanian	1.927.139.800,00	1.916.147.765,00	99,43	
3	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	92.181.425,08	115.849.972,00	125,68	Sangat Berhasil	Program Perizinan Usaha Pertanian	39.335.250,00	38.362.100,00	97,53	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
		Nilai produksi hasil perikanan	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)	34.977.794,39	37.829.168,00	108,15	Sangat Berhasil	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.932.342.514,00	1.930.722.099,00	99,92	
4	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	87,7	88,87	101,33	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.775.500,00	111.095.550,00	96,79	
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.250.200,00	10.250.200,00	100,00	
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	53.205.700,00	51.727.700,00	97,22	
5	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	85,23	85,23	100,00	Sangat Berhasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.199.095.706,00	9.110.816.909,00	99,04	

Blitar, 28 Pebruari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



drh. DEWI MASITOH, M.Agr.

Pembina Tingkat 1 (IVb)

NIP 197912062006042005